

## **BAB III**

### **ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS**

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh timbal balik dengan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan di daerah memang telah memperlihatkan keberhasilan di segala bidang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan-permasalahan pembangunan juga masih banyak. Berdasarkan identifikasi permasalahan - permasalahan pembangunan daerah itulah, dapat dilakukan analisis isu-isu strategis mulai dari Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Infrastruktur, sampai pada Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah.

#### **3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil yang terjadi pada saat pelaksanaannya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak teratasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan hal tersebut maka identifikasi permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Majene dapat diurai sebagai berikut :

### **3.1.1 Bidang Ekonomi**

Pembangunan di bidang ekonomi meliputi urusan pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, serta ketahanan pangan.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Majene dari tahun ke tahun memperlihatkan kecenderungan yang cukup meningkat. Sampai dengan tahun 2006 sektor pertanian menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB kab. Majene sebesar 52,98 %. Namun dari tahun ke tahun kontribusi dari sektor ini terus mengalami penurunan karena adanya peningkatan kontribusi dari sektor lain seperti; sektor jasa – jasa; sektor keuangan dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor industri pertambangan dan penggalian. Permasalahannya adalah belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian sehingga masih rendahnya produksi pertanian jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki daerah ini. Menurunnya kuantitas produksi pertanian yang diakibatkan oleh tingginya alih fungsi lahan dan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan lahan kritis. Terbatasnya infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi, jalan produksi, serta perbaikan jalan desa untuk kepentingan produksi dan pemasaran. Perubahan iklim dan serangan hama penyakit tanaman & ternak juga merupakan penyebab menurunnya produktifitas serta belum optimalnya keberadaan penyuluh

sebagai pembina petani dan belum optimalnya penanganan pasca panen juga sangat mempengaruhi produktifitas hasil pertanian.

Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Mikro juga belum memperlihatkan peran yang signifikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi sehingga masih perlu dikembangkan dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah dimasa datang. Permasalahan terhadap akses permodalan, sumber daya manusia dan jaringan pemasaran menjadi kendala. Tingginya kredit konsumsi dibanding kredit investasi juga sangat menghambat kontribusi koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sektor Industri masih mengandalkan kerajinan dan industri rumah tangga seperti industri minyak kelapa, industri penenunan sarung sutera dan industri pengolahan lainnya. Permasalahan yang timbul karena daya saing produksi masih rendah, masih terbatasnya kemampuan dalam penguasaan dan pengembangan teknologi serta masih rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya industri.

### **3.1.2 Bidang Sosial Budaya**

Pembangunan di Bidang Sosial Budaya meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, budaya dan pariwisata, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja dan sosial, pemberdayaan masyarakat desa, dan perpustakaan dan kearsipan.

Permasalahan pada bidang Pendidikan adalah masih rendahnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil, hal tersebut disebabkan karena tidak meratanya tenaga pendidik dan masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di daerah terpencil serta masih rendahnya mutu proses belajar mengajar. Di samping itu, implementasi Kabupaten Majene sebagai Pusat Pendidikan di Sulawesi Barat yang merupakan komitmen para deklaratour pendirian Provinsi Sulawesi Barat, belum optimal.

Di bidang Kesehatan permasalahan yang di hadapi adalah masih rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah yang diindikasikan dengan masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Selain itu belum meratanya distribusi tenaga kesehatan mengakibatkan rendahnya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat serta sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai sehingga perilaku masyarakat kurang mendukung pola hidup Bersih dan Sehat.

Permasalahan yang dihadapi pada bidang Pemuda dan Olah Raga adalah belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan keolahragaan. Masih terbatasnya ruang gerak untuk mengekspresikan idealisme dari semua aspek. Pembangunan keolahragaan belum tertata secara sistematis antara olah raga pendidikan di lingkungan sekolah, olah raga rekreasi di

lingkungan masyarakat, serta olah raga prestasi bagi kelompok atlet potensial yang menjadi andalan di tingkat regional dan nasional. Hal tersebut terlihat dari terbatasnya sarana dan prasarana olah raga dan kepemudaan yang representatif serta rendahnya partisipasi dunia usaha dalam pembinaan keolahragaan dan kepemudaan.

Untuk bidang Budaya dan Pariwisata menghadapi permasalahan yang merupakan konsekuensi dari perkembangan global yaitu terciptanya kondisi yang berpotensi mempertentangkan antara nilai tradisional dengan pengaruh global. Hal ini sangat berpengaruh terhadap lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, lemahnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi keragaman budaya yang dapat menimbulkan krisis jati diri dan berpotensi akan timbulnya komplik sosial dan disintegrasi. Disamping itu masih rendahnya upaya - upaya pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya, pengelolaan potensi pariwisata daerah, dan rendahnya promosi pariwisata daerah serta masih terbatasnya event - event budaya yang berkualitas yang dapat mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah.

Permasalahan pada urusan Tenaga Kerja dan Sosial adalah masih tingginya tingkat pengangguran yang di akibatkan oleh ketidak seimbangan antara laju pertumbuhan angkatan kerja

dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja. Masih sangat rendahnya keterampilan para pencari kerja, serta kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Dalam bidang Sosial terkendala masih terdapatnya kesenjangan taraf hidup antara masyarakat kota dan masyarakat pedesaan serta belum terpenuhinya pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu (miskin).

Permasalahan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah masih rendahnya kualitas SDM pemerintah desa dan aparat dalam menangani pemerintahan desa, belum optimalnya peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk turut berperan dalam proses pembangunan, belum adanya Desa Mandiri dan masih tingginya ketergantungan pada pemerintah kabupaten.

Permasalahan pada urusan Perpustakaan dan Kearsipan adalah belum tersedianya bangunan perpustakaan dan arsip daerah, masih rendahnya budaya baca di kalangan masyarakat dan pembinaan perpustakaan, belum optimalnya inventarisasi arsip daerah karena belum tersedianya sistem administrasi kearsipan serta masih rendahnya kualitas dan kuantitas informasi perpustakaan.

### **3.1.3 Bidang Infrastruktur**

Pembangunan di bidang Infrastruktur meliputi urusan prasarana wilayah dan pemukiman, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, tata ruang, energi dan sumberdaya mineral serta perencanaan pembangunan daerah.

Bidang Prasarana Wilayah dan Pemukiman secara umum kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana wilayah masih rendah/ belum merata. Hal tersebut dapat dilihat belum optimalnya pembangunan jalan, jembatan, drainase dan sarana lainnya serta belum optimalnya sarana dan prasarana pengembangan jaringan irigasi dan rawa. Kebutuhan pada sarana dan prasarana pemukiman adalah jumlah perumahan dan cakupan air bersih masih sangat rendah dengan masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki rumah layak huni di perkotaan dan pedesaan. Keberadaan prasarana persampahan juga belum optimal. Belum adanya regulasi Rencana Pembangunan Perkotaan sehingga belum ada lokasi wilayah strategis dan cepat tumbuh dan penyelesaian masalah kumuh perkotaan, yang mengakibatkan perilaku masyarakat perkotaan dalam mengatasi masalah pemukiman belum optimal.

Bidang Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan karena kerusakan lingkungan akan berimbas kepada ketersediaan sumber daya alam dan daya

dukung alam. Penurunan daya dukung lingkungan di sebabkan karena masih banyaknya kegiatan alih fungsi hutan dari yang berfungsi lindung menjadi fungsi lahan budidaya, kerusakan dan berkurangnya luasan mangrove dan terumbu karang, penambangan yang merusak lingkungan, sedimentasi sungai dan abrasi pantai serta pengambilan sumber daya air yang tidak terkendali. Hal tersebut di perparah dengan perilaku dan budaya yang belum ramah lingkungan dan rendahnya pemahaman resiko bencana, baik dari sisi perilaku pembangunan maupun dari perilaku individu masyarakatnya. Sehingga upaya pengelolaan lingkungan belum mampu menahan laju kerusakan lingkungan.

Permasalahan pada urusan Perhubungan adalah masih rendahnya kualitas cakupan pelayanan yang meliputi transportasi darat, yang dicirikan dengan tingginya tingkat kecelakaan pada ruas jalan provinsi, kesemrawutan lalu lintas pada kawasan perdagangan, dan belum efektifnya penggunaan terminal sebagai pusat kegiatan naik-turun penumpang angkutan umum. Di samping itu minimnya sarana-prasarana perhubungan dalam menunjang pelayanan bidang perhubungan serta belum optimalnya pengelolaan parkir daerah sehingga berdampak pada belum optimalnya penarikan retribusi dari sektor perhubungan dalam menunjang kontribusi terhadap PDRB.



Permasalahan pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah masih belum mampu memberikan hasil yang signifikan bagi masyarakat. Terbatasnya kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang berdaya saing sehingga terjadi kesenjangan informasi pembangunan terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan karena sumber daya informasi dan teknologi masih terbatas. Mekanisme intermediasi yang menjembatani interaksi kapasitas penyedia teknologi informasi dan kebutuhan pengguna belum efektif. Sinerji kebijakan serta budaya pemanfaatan teknologi informasi yang masih lemah mengakibatkan teknologi informasi belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan.

Permasalahan pada bidang Tata Ruang adalah belum adanya regulasi yang mengatur tentang tata ruang wilayah, belum optimalnya pemanfaatan surat ijin mendirikan bangunan dalam mengendalikan fungsi tata ruang, dan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan & pengelolaan penataan ruang.

Bidang Energi Dan Sumberdaya Mineral menghadapi permasalahan dengan masih banyaknya desa-desa terpencil yang belum tersentuh jaringan listrik, tidak adanya pemeliharaan pembangkit listrik baik PLTMH maupun Tenaga air, belum terealisasinya MOU potensi pertambangan antara pemerintah dengan pihak ketiga dan belum tergalinya potensi-potensi pertambangan dan sumber daya mineral baru.

Permasalahan dalam bidang Perencanaan Pembangunan adalah Belum tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), kurangnya koordinasi antar SKPD dalam penyusunan Program penyelenggaraan pembangunan, belum terbangunnya sinergitas antara dokumen perencanaan, proses Musrenbang belum menumbuhkan Prakarsa Kemandirian Masyarakat dalam pemenuhan segala kebutuhan masyarakat.

#### **3.1.4 Bidang Kapasitas Pemerintah**

Pembangunan di bidang ini meliputi urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian & Diklat Daerah serta urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.

Adapun permasalahan yang di hadapi bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum adalah belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat karena Standar Pelayanan Minimum belum di terapkan, masih rendahnya budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja dan produktifitas kerja dan belum efektifnya sistem birokrasi.

Permasalahan pada bidang Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja birokrasi, belum optimalnya penerapan Perda - Perda, belum optimalnya PAD

yang berdampak pada ketergantungan Pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, masih terbatasnya jumlah dan kualitas pengelolaan keuangan dan auditor daerah berdampak pada belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan dan pengawasannya, masih rendahnya kesadaran wajib pajak masyarakat, belum optimalnya fungsi Diklat Daerah yang dapat menunjang profesionalisme & Kompetensi pegawai negeri, belum adanya mekanisme reward dan punishment serta, belum tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian dalam pemeriksaan keuangan.

Adapun permasalahan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan daerah atau nasional yang dapat mendorong ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan, maupun toleransi bermasyarakat serta kurangnya pembinaan, LSM, Ormas, dan OKP serta kegiatan politik daerah.

### **3.2 Isu - Isu Strategis**

Melihat permasalahan - permasalahan pembangunan yang diuraikan di atas, maka isu - isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian untuk di atasi secara bertahap dan berkesinambungan di Kabupaten Majene dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
2. Pentingnya penegakan kedaulatan rakyat dalam menopang penciptaan iklim demokrasi wilayah Kab. Majene
3. Ancaman degradasi penerapan nilai-nilai agama dan kebudayaan dalam pembangunan
4. Pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan
5. Belum meratanya pembangunan infrastruktur pada wilayah perkotaan dan perdesaan
6. Pengoptimalan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat
7. Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat
8. Optimalisasi pengelolaan potensi SDA secara professional
9. Perlunya pembangunan tanpa merusak lingkungan hidup